



RENCANA KINERJA TAHUNAN

SEKRETARIAT BKPK TAHUN 2025

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (RKT Sekretariat BKKPK) Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan turunan dari dokumen perencanaan kinerja 5 (lima) tahunan (Renstra dan Rencana Aksi Program (RAP), serta penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). RKT Sekretariat BKKPK Tahun 2025 memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai Sekretariat BKKPK pada tahun 2025 serta anggaran yang dialokasikan. Dokumen RKT diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan perencanaan, pengukuran kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Sekretariat BKKPK sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien untuk menunjang dan berkontribusi pencapaian tujuan pembangunan bidang kesehatan.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan pemikiran dan kerja kerasnya dalam penyusunan RKT Sekretariat BKKPK Tahun 2025.

Jakarta, Oktober 2025

Sekretaris BKKPK

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Etik Retno Wiyati".

dr. Etik Retno Wiyati, MARS., M.H

Rencana Kerja Tahunan Sekretariat BPKP Tahun 2025

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	6
A. LATAR BELAKANG	6
B. STRUKTUR ORGANISASI	7
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	10
A. VISI.....	10
B. MISI	10
C. TUJUAN	11
D. SASARAN	12
E. RENCANA KEGIATAN	13
BAB III RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT BPKP TAHUN 2025.	16
A. RENCANA KINERJA	16
B. RENCANA ANGGARAN.....	22
BAB IV PENUTUP	23

LAMPIRAN

DAFTAR KONTRIBUTOR

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan	12
Tabel III.1 Rencana Kinerja Sekretariat BKKP pada Renstra Kemenkes 2025-2029	17
Tabel III.2 Rencana Anggaran Sekretariat BKKP pada Renstra Kemenkes 2025-2029	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Struktur Organisasi Sekretariat BKKPK 9

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap tahun Kementerian/Lembaga harus menyusun rencana kerja Kementerian/Lembaga yang mengacu pada dokumen rencana strategis masing-masing Kementerian/Lembaga.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan, merupakan dokumen turunan dari dokumen perencanaan dan penganggaran 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Strategis Kementerian Kesehatan pada tingkat Kementerian/Lembaga dan Rencana Aksi Program (RAP) pada tingkat Eselon I; dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) pada tingkat Unit Kerja.

RKT merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). RKT dibuat dalam bentuk kegiatan rinci hasil penuangan matriks Renja K/L. Dalam perencanaan kinerja tersebut, ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi unit kerja untuk mencapainya dalam periode satu tahun.

Keterkaitan RKT dengan Renja-KL harus tercermin pada penggunaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program hingga indikator kinerja, target dan rencana alokasi anggaran tahun anggaran berjalan. RKT dan Renja-KL merupakan dokumen yang saling melengkapi dari sisi penjabaran kegiatan dan usulan alokasi anggarannya. Dalam kaitan ini, RKT melengkapi secara rinci menuangkan perencanaan anggaran yang tercermin dalam dokumen Renja-KL.

RKT Sekretariat BKKPK Tahun 2025 memuat sasaran kinerja, program kinerja, indikator kinerja, target kinerja periodik, kegiatan/aktivitas dan rincian anggaran Sekretariat BKKPK tahun 2025. Dalam penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan

Rencana Kerja Tahunan Sekretariat BKKPK Tahun 2025

Penganggaran (RSPP) dengan pendekatan perencanaan penganggaran berbasis kinerja, langkah-langkah atau tahapan tersebut dijabarkan dalam bentuk Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), sampai dengan tahapan pelaksanaan atau pencapaian suatu output. Selain itu, Dokumen RKT dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan serta evaluasi capaian kinerja Sekretariat BKKPK.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini disusun dengan tujuan:

1. sebagai acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran satuan kerja yang lebih rinci (Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga/RKA-KL)
2. memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Sekretariat BKKPK Tahun 2025, dan
3. dokumen pengendalian serta pengawasan pencapaian sasaran dan target indikator kinerja Sekretariat BKKPK tahun 2025 dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Penyusunan dokumen RKT Sekretariat BKKPK diharapkan memberikan gambaran keselarasan perencanaan kegiatan mulai dari rencana kerja jangka menengah atau 5 (lima) tahunan (RPJMN, Renstra, RAP, dan RAK 2025-2029), sampai dengan rencana kerja tahunan (Renja K/L, RKT, dan RKA-K/L). Dengan demikian, target kinerja tahunan dan jangka menengah dapat dicapai dengan baik.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kesehatan, Sekretariat BKKPK mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Badan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat BKKPK menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran badan;
- b. Pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan badan;
- c. Pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik/kekayaan negara badan;

Rencana Kerja Tahunan Sekretariat BKKPK Tahun 2025

- d. Koordinasi dan pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan badan;
- e. Penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain badan;
- f. Penyusunan rumusan perjanjian kerja sama badan;
- g. Pelaksanaan advokasi hukum badan;
- h. Penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana badan;
- i. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi badan;
- j. Pengelolaan sumber daya manusia badan;
- k. Pengelolaan hubungan masyarakat dan perpustakaan badan;
- l. Pengelolaan data dan sistem informasi badan;
- m. Koordinasi pemantauan hasil integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan;
- n. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- o. Pelaksanaan urusan administrasi sekretariat badan.

Sesuai Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.I/358/2025 tentang Penunjukan Ketua Tim Kerja di Lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Sekretariat BKKPK memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- a) Sekretaris dan
- b) Tim Kerja (Timker) yang terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana meliputi:
 - Tim Kerja Program dan Anggaran
 - Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan
 - Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
 - Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
 - Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan
 - Tim Kerja Dukungan Manajemen

Rencana Kerja Tahunan Sekretariat BPKP Tahun 2025

Struktur organisasi Sekretariat BPKP tersaji dalam gambar berikut:



Gambar I.1 Struktur Organisasi Sekretariat BPK

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. VISI

Visi nasional pembangunan jangka panjang adalah Indonesia Emas 2045. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Visi Presiden 2025-2029, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029, yakni “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Untuk melaksanakan visi tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkannya dalam visi bidang kesehatan, yaitu “Masyarakat yang sehat dan produktif guna mewujudkan Indonesia Emas 2045”.

Visi ini mencerminkan komitmen Kementerian Kesehatan untuk membangun sumber daya manusia yang sehat, kuat, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penguatan sistem kesehatan nasional, serta pencegahan dan pengendalian penyakit. Dengan masyarakat yang sehat dan produktif, diharapkan Indonesia dapat mencapai kesejahteraan dan kemajuan berkelanjutan menuju cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

B. MISI

Kementerian Kesehatan melaksanakan Misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029 terutama pada Asta Cita nomor 4, yaitu “memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”. Asta cita tersebut dituangkan dalam RPJMN 2025-2029 sebagai Prioritas nasional (PN) ke-4 dalam RPJMN. Untuk mendukung PN 4 pada RPJMN dan mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan Periode 2025-2029, maka ditetapkan Misi Kementerian Kesehatan untuk periode yang sama yaitu sebagai berikut:

1. mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup;
2. memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil dan terjangkau;
3. mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif;

4. menguatkan tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif, adil dan berkelanjutan;
5. mengembangkan teknologi kesehatan yang maju; dan
6. mewujudkan Kementerian Kesehatan yang agile, efektif dan efisien

C. TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi, ditetapkan 6 tujuan Kementerian Kesehatan dengan 6 indikator tujuan untuk tahun 2025-2029 yaitu :

1. Masyarakat sehat di setiap siklus hidup;
2. Layanan Kesehatan yang baik, adil dan terjangkau;
3. Sistem Ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif;
4. Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan;
5. Teknologi Kesehatan yang maju;
6. Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien.

Untuk mendukung tujuan di atas, diperlukan layanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan cakupan layanan esensial menjadi fokus utama Kementerian Kesehatan. Akses terhadap layanan yang adil akan mengurangi kesenjangan, mempercepat deteksi dan penanganan penyakit, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Dalam situasi darurat seperti pandemi, sistem kesehatan yang tangguh dan responsif juga dibutuhkan. Tercapainya tujuan-tujuan tersebut juga turut ditentukan oleh efektivitas pengelolaan dan pembiayaan kesehatan. Di sisi lain, kemajuan teknologi kesehatan juga diukur dari persentase populasi yang menggunakan sistem informasi kesehatan nasional. Kementerian Kesehatan juga berkomitmen untuk membangun tata kelola kelembagaan yang responsif terhadap dinamika global, nasional, dan lokal melalui penerapan prinsip-prinsip birokrasi dan layanan yang agile, efektif, dan efisien.

D. SASARAN

Dalam rangka mencapai Tujuan Kementerian Kesehatan, maka ditetapkan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

Tujuan		Sasaran Strategis	
1	Masyarakat sehat di setiap siklus hidup	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Promotif dan Preventif
		1.2	Meningkatnya literasi kesehatan masyarakat
2	Layanan Kesehatan yang baik, adil dan terjangkau	2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes
3	Sistem Ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif	3.1	Meningkatnya kesiapsiagaan & tanggap darurat kesehatan
4	Tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif, adil dan berkelanjutan	4.1	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pembiayaan kesehatan di pusat dan daerah
5	Teknologi kesehatan yang maju	5.1	Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis
6	Kementerian Kesehatan yang <i>agile</i> , efektif dan efisien	6.1	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan

E. RENCANA KEGIATAN

Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKKPK) sebagai pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi di BKKPK mengelola 2 (dua) sasaran kegiatan di dalam 2 (dua) sasaran program di tahun 2025 yaitu :

Kegiatan: Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengelolaan Integrasi dan Sinergi Pencapaian Sasaran Pembangunan Kesehatan

Sasaran kegiatan ini mendukung sasaran Program Meningkatnya Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah. Sasaran kegiatan diarahkan untuk memastikan terbangunnya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah melalui perumusan, sinkronisasi, serta penguatan regulasi, indikator yang digunakan:

- **IKK 26.2.1 Persentase provinsi yang memiliki kebijakan mendukung indikator kesehatan nasional**, dengan target 15% pada tahun 2025 dengan sumber data berasal dari Pemda, Kemendagri, dan JDIH. Pencapaian indikator ini akan mendorong terbentuknya regulasi provinsi yang selaras dengan kebijakan nasional. Pelaporan dilakukan secara tahunan oleh Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. IKK ini mendukung IKP 26.2 Persentase daerah yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional

Kegiatan: Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran kegiatan ini merupakan sasaran kegiatan pada Program Dukungan Manajemen. Sasaran kegiatan ini mendukung sasaran program Meningkatnya tata kelola organisasi dan pengendalian intern Kementerian Kesehatan, dalam pencapaian sasaran program dan indikator kinerja program dikoordinasikan oleh unit

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Kegiatan ini berfungsi sebagai pilar penguatan sistem internal organisasi yang meliputi perbaikan proses bisnis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan keuangan yang akuntabel, serta penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang berkelanjutan yang diukur melalui lima Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dijelaskan sebagai berikut:

- **IKK 33.1.7 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan**, indikator ini mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan yang diberikan oleh BKKPK, baik layanan kebijakan maupun layanan administratif. Target nilai 77 pada tahun 2025 yang berasal dari Survei Indeks Kepuasan Pengguna Layanan. Pelaporan dilakukan secara tahunan oleh Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. IKK ini mendukung IKP 33.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes
- **IKK 33.2.7 Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan**, indikator ini menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran di lingkungan BKKPK. Target 92,35 pada tahun 2025 bersumber data Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kementerian Keuangan dengan pelaporan dilakukan secara tahunan oleh Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. IKK ini mendukung IKP 33.2 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan.
- **IKK 33.3.7 Indeks Kualitas SDM Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan**, indikator ini menilai penerapan sistem merit dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara di lingkungan BKKPK. Target nilai 81 pada tahun 2025 menunjukkan penguatan profesionalisme dan tata kelola SDM berbasis kinerja. Data indikator ini bersumber dari Hasil Penilaian Mandiri Sistem Merit dengan pelaporan tahunan yang dikelola oleh Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. IKK ini mendukung IKP 33.3 Nilai Penerapan Sistem Merit Kemenkes
- **IKK 33.4.16 Nilai maturitas manajemen risiko Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan**, indikator ini mengukur tingkat kematangan

penerapan sistem manajemen risiko di lingkungan BKKPK. Target nilai 3,95 pada tahun 2025 menunjukkan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan risiko kelembagaan dan kegiatan. Data indikator ini bersumber dari Hasil Penilaian APIP atas Maturitas Manajemen Risiko dengan pelaporan tahunan yang dikelola oleh Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. IKK ini mendukung IKP 33.4 Nilai Maturitas SPIPT

- **IKK 33.4.24 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan,** indikator ini mengukur tingkat kepatuhan dan ketepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Target tahun 2025 sebesar 95% mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan tata kelola yang baik. Data indikator ini bersumber dari Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut LHP BPK dengan pelaporan semesteran yang juga dikelola oleh Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. IKK ini mendukung IKP 33.4 Nilai Maturitas SPIPT

BAB III RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT BKKPK TAHUN 2025

A. RENCANA KINERJA

Rencana kinerja Sekretariat BKKPK tahun 2025 mengacu pada dokumen Rencana Strategis yang tertuang pada Permenkes Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029. Sekretariat BKKPK mendukung pencapaian kinerja pada program KPK dan Program Dukman melalui kegiatan 6837 dan 6797 yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Rencana Kerja Tahunan Sekretariat BKKPK Tahun 2025

Tabel III.1 Rencana Kinerja Sekretariat BKKPK pada Renstra Kemenkes 2025-2029

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan		Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
Program: DS.Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan				
Sasaran Program : Meningkatnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah				
IKP 26.2 Persentase daerah yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional			15%	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengelolaan Integrasi dan Sinergi Pencapaian Sasaran Pembangunan Kesehatan				
IKK 26.2.1 Persentase provinsi yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional			15%	
	KRO ABG : Kebijakan Bidang Kesehatan			
	Rincian Output: 6837.ABG.001 Analisis Situasi Kesehatan	1 RK	3.247.286	
	KRO AEA : Koordinasi			
	Rincian Output: 6837.AEA.001 Advokasi dan komunikasi kebijakan kesehatan	1 Kegiatan	1.382.302	
	Rincian Output: 6837.AEA.002 Integrasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan	1 Kegiatan	1.252.600	

Rencana Kerja Tahunan Sekretariat BKKPK Tahun 2025

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya			
IKK 33.1.7 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		77 (nilai)	
	KRO EBA : Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	Rincian Output: 6797.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3 Layanan	909.276
IKK 33.2.7 Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		92,35 (Nilai)	
	KRO CAN : Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		
	Rincian Output: 6797.CAN.951 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	6 Unit	615.830
	KRO CCL : OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		
	Rincian Output: 6797.CCL.951 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	6 Unit	1.266.072
	KRO EBA : Layanan Dukungan Manajemen Internal		

Rencana Kerja Tahunan Sekretariat BKKPK Tahun 2025

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Rincian Output: 6797.EBA.956 Layanan BMN	1 Layanan	373.818
	Rincian Output: 6797.EBA.957 Layanan Hukum	1 Layanan	608.050
	Rincian Output: 6797.EBA.959 Layanan Protokoler	1 Layanan	379.829
	Rincian Output: 6797.EBA.962 Layanan Umum	5 Layanan	5.766.160
	Rincian Output: 6797.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	161.002
	Rincian Output: 6797.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	5 Layanan	136.495
	Rincian Output: 6797.EBA.994 Layanan Perkantoran	1 Layanan	54.442.978
	KRO EBB: Layanan Sarana dan Prasarana Internal		
	Rincian Output: 6797.EBB.951 Layanan Sarana Internal	11 Unit	1.625.480
	KRO EBC : Layanan Manajemen SDM Internal		
	Rincian Output: 6797.EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	280 Orang	2.526.909
	KRO EBD : Layanan Manajemen Kinerja Internal		

Rencana Kerja Tahunan Sekretariat BPKP Tahun 2025

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Rincian Output: 6797.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6 Dokumen	1.273.945
	Rincian Output: 6797.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3 Dokumen	597.937
	Rincian Output: 6797.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	2 Dokumen	742.474
	Rincian Output: 6797.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	1 Dokumen	451.369
	Rincian Output: 6797.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen	100.522
IKK 33.3.7 Indeks Kualitas SDM Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		81 (Nilai)	
	KRO EBC : Layanan Manajemen SDM Internal		
	Rincian Output: 6797.EBC.954 Layanan Manajemen SDM	564 Orang	1.155.699
IKK 33.4.16 Nilai maturitas manajemen risiko Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		3,95 (Nilai)	
	KRO EBA : Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	Rincian Output: 6797.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3 Layanan	241.796
IKK 33.4.24 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas		95%	

Rencana Kerja Tahunan Sekretariat BKKPK Tahun 2025

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
ditindaklanjuti Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan			
	KRO EBA : Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	Rincian Output: 6797.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3 Layanan	85.256

B. RENCANA ANGGARAN

Anggaran Sekretariat BKKPK tahun 2025 sebesar Rp 79.005.919.000,- yang digunakan untuk dua program dan dua kegiatan utama dengan rincian pada tabel III.2 berikut ini.

Tabel III.2 Rencana Anggaran Sekretariat BKKPK pada Renstra Kemenkes 2025-2029

(dalam ribuan Rupiah)		
No.	Program/Kegiatan	Anggaran
I.	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	5.882.188
	1.. Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	5.882.188
I.	Program Dukungan Manajemen	73.123.731
	1. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	73.460.897
Total Anggaran		79.005.919

BAB IV PENUTUP

Sekretariat BKKPK sebagai pelaksana koordinasi tugas dan pemberian dukungan administrasi penyusunan kebijakan berbasis bukti berupaya mendukung peningkatan kualitas penyusunan kebijakan Kemenkes, pemanfaatan data yang akurat dan analisis yang tepat diharapkan Kemenkes dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat, produktif, serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan tersusunnya dokumen RKT ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas atas keselarasan perencanaan dan penganggaran pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat BKKPK, serta dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan di Sekretariat BKKPK sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien untuk menunjang dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan bidang kesehatan.

Tim penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang berkontribusi atas penyusunan dokumen RKT Sekretariat BKKPK Tahun 2025 ini. Besar harapan kami dokumen ini dapat bermanfaat. Karena keterbatasan pengetahuan dan referensi, tim penyusun menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu masukan dan saran yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan atau penyempurnaan dokumen RKT Sekretariat BKKPK tahun 2025 sangat diharapkan agar dokumen RKT ini dapat disusun menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA | : | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| 2. PROGRAM | : | DS - Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan |
| 3. SASARAN PROGRAM | : | 01 - Meningkatnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah |
| 4. KEGIATAN | : | 6837 - Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan |
| 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) | : | 08 - Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan |
| 6. SASARAN KEGIATAN | : | |

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Meningkatnya pengelolaan integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan		5.882.188,0
01.01	Persentase provinsi yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional	15	
Total			5.882.188,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	704 - Strategi Komunikasi Kebijakan										422.504,0
		Pusat	Pusat								422.504,0
01.AEA.002	Integrasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan								006 - Anggaran Kesehatan		1.252.600,0
	701 - Pendampingan Penyusunan Naskah Akademik/ Naskah Kajian										170.302,0
		Pusat	Pusat								170.302,0
	702 - Pendampingan Penyusunan Arsitektur Kebijakan dan Pedoman NSPK										176.200,0
		Pusat	Pusat								176.200,0
	703 - Pendampingan Kebijakan atau Regulasi Kemenkes Berdasarkan Kajian										229.590,0
		Pusat	Pusat								229.590,0
	704 - Penyusunan Peraturan Pelaksana UU Kesehatan										676.508,0
		Pusat	Pusat								676.508,0
Total											5.882.188,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Meningkatnya pengelolaan integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan				5.882.188,0				0,0	0,0	0,0
01.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		3.247.286,0				0,0	0,0	0,0
01.ABG.001	Analisis Situasi Kesehatan	1	Rekomendasi Kebijakan		3.247.286,0	1	0	0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.001.701	Manajemen Pelaksanaan Pembinaan Wilayah	1,0	Laporan	1.948.934,0	1.948.934,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.001.702	Analisis Isu Strategis Kesehatan	1,0	Laporan	481.274,0	481.274,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.001.703	Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan	1,0	Laporan	817.078,0	817.078,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA	Koordinasi		kegiatan		2.634.902,0				0,0	0,0	0,0
01.AEA.001	Advokasi dan Komunikasi Kebijakan Kesehatan	1	kegiatan		1.382.302,0	1	1	0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.001.701	Komunikasi dan Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan	1,0	Laporan	392.678,0	392.678,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.001.702	Advokasi dan Utilisasi Hasil Analisis Kebijakan	1,0	Laporan	567.120,0	567.120,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.001.704	Strategi Komunikasi Kebijakan	1,0	Laporan	422.504,0	422.504,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.002	Integrasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan	1	kegiatan		1.252.600,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.AEA.002.701	Pendampingan Penyusunan Naskah Akademik/ Naskah Kajian	1,0	Laporan	170.302,0	170.302,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.002.702	Pendampingan Penyusunan Arsitektur Kebijakan dan Pedoman NSPK	1,0	Laporan	176.200,0	176.200,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.002.703	Pendampingan Kebijakan atau Regulasi Kemenkes Berdasarkan Kajian	1,0	Laporan	229.590,0	229.590,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.002.704	Penyusunan Peraturan Pelaksana UU Kesehatan	1,0	Laporan	676.508,0	676.508,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
	Total				5.882.188,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan
4. KEGIATAN : 6797 - Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 08 - Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya		73.123.731,0
01.01	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	77	
01.02	Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	92,35	
01.03	Indeks Kualitas SDM Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	81	
01.04	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	3,95	
01.05	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	95	
Total			73.123.731,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	704 - Layanan Kekayaan Intelektual										8.124,0
		Pusat	Pusat								8.124,0
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi							006 - Anggaran Kesehatan			909.276,0
	722 - Pengelolaan Hubungan Masyarakat										909.276,0
		Pusat	Pusat								909.276,0
01.EBA.959	Layanan Protokoler							006 - Anggaran Kesehatan			394.891,0
	701 - Layanan Protokoler										394.891,0
		Pusat	Pusat								394.891,0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal							006 - Anggaran Kesehatan			327.732,0
	705 - Penataan Organisasi										241.942,0
		Pusat	Pusat								241.942,0
	706 - Penataan Tata Laksana										85.790,0
		Pusat	Pusat								85.790,0
01.EBA.962	Layanan Umum							006 - Anggaran Kesehatan			5.823.416,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi							006 - Anggaran Kesehatan			597.937,0
	721 - Pelaksanaan Layanan Pemantauan dan Evaluasi										597.937,0
		Pusat	Pusat								597.937,0
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan							006 - Anggaran Kesehatan			742.474,0
	721 - Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan										418.882,0
		Pusat	Pusat								418.882,0
	722 - Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut LHP dan Dokumen TPTGR										58.933,0
		Pusat	Pusat								58.933,0
	723 - Monitoring dan Evaluasi Keuangan										25.872,0
		Pusat	Pusat								25.872,0
	724 - Pengelolaan Perbendaharaan										238.787,0
		Pusat	Pusat								238.787,0
01.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja							006 - Anggaran Kesehatan			460.231,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	721 - Pengelolaan RB dan WBK/WBBM										314.221,0
		Pusat	Pusat								314.221,0
	722 - Penyelenggaraan SPIP										146.010,0
		Pusat	Pusat								146.010,0
01.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan								006 - Anggaran Kesehatan		100.522,0
	721 - Penatausahaan Kearsipan										100.522,0
		Pusat	Pusat								100.522,0
Total											73.123.731,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya				73.123.731,0				0,0	0,0	0,0
01.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit		608.970,0				0,0	0,0	0,0
01.CAN.951	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	Unit		608.970,0	6	6	6	0,0	0,0	0,0
01.CAN.951.715	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	3,0	Unit		168.194,7	504.584,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.CAN.951.716	Pengadaan Software	1,0	Unit	104.386,0	104.386,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit		1.266.072,0				0,0	0,0	0,0
01.CCL.951	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	Unit		1.266.072,0	6	6	6	0,0	0,0	0,0
01.CCL.951.701	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,0	Unit	198.450,0	198.450,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.CCL.951.702	Pengadaan Sistem Keamanan Jaringan	2,0	Unit	133.189,5	266.379,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
01.CCL.951.703	Pemeliharaan Prasarana TIK	3,0	Unit	126.681,7	380.045,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
01.CCL.951.704	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi	0,0	Laporan	Infinity	421.198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Laporan/ Dokumen/ Rekomendasi/ Unit		63.177.658,0				0,0	0,0	0,0
01.EBA.956	Layanan BMN	1	Layanan		373.818,0	5	5	5	0,0	0,0	0,0
01.EBA.956.715	Pengelolaan BMN	5,0	Laporan	74.763,6	373.818,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.957	Layanan Hukum	1	Layanan		608.050,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBA.957.701	Pelaksanaan Layanan Penyusunan Regulasi	1,0	Layanan	402.456,0	402.456,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.957.702	Penyusunan Dokumen Kerja Sama (MOU/PKS)	1,0	Layanan	21.390,0	21.390,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.957.703	Bimtek Hukum	1,0	Laporan	176.080,0	176.080,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.957.704	Layanan Kekayaan Intelektual	1,0	Layanan	8.124,0	8.124,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3	Layanan		909.276,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBA.958.722	Pengelolaan Hubungan Masyarakat	1,0	Laporan	909.276,0	909.276,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)	
						2026	2027	2028	2026	2027
01.EBA.959	Layanan Protokoler	1	Layanan		394.891,0	1	1	1	0,0	0,0
01.EBA.959.701	Layanan Protokoler	1,0	Laporan	394.891,0	394.891,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan		327.732,0	3	3	3	0,0	0,0
01.EBA.960.705	Penataan Organisasi	1,0	Laporan	241.942,0	241.942,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960.706	Penataan Tata Laksana	1,0	Laporan	85.790,0	85.790,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.962	Layanan Umum	5	Layanan		5.823.416,0	4	4	4	0,0	0,0
01.EBA.962.711	Pengelolaan Tata Persuratan	1,0	Laporan	91.689,0	91.689,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
01.EBA.962.712	Pengelolaan Kerumahtanggaan	1,0	Laporan	913.411,0	913.411,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
01.EBA.962.713	Layanan Pimpinan	1,0	Laporan	2.364.913,0	2.364.913,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
01.EBA.962.714	Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	0,0	Laporan	Infinity	134.091,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.962.715	Layanan Perpustakaan	1,0	Laporan	928.680,0	928.680,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.962.716	Pengelolaan Layanan Kesehatan	0,0	Laporan	Infinity	132.232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.962.717	Layanan Umum Unit Kerja	0,0	Laporan	Infinity	1.258.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan		161.002,0	1	1	1	0,0	0,0
01.EBA.963.701	Pengorganisasian dan Pengelolaan Data	1,0	Laporan	161.002,0	161.002,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
01.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	5	Layanan		136.495,0	1	1	1	0,0	0,0
01.EBA.969.701	Advokasi dan Pendampingan Hukum	1,0	Laporan	65.155,0	65.155,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
01.EBA.969.702	Layanan Unit Pengendalian Gratifikasi	1,0	Layanan	71.340,0	71.340,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan		54.442.978,0	5	5	5	0,0	0,0
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5,0	Layanan	10.888.595,6	54.442.978,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Unit/ m2/ Paket		1.205.314,0				0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal	11	Unit		1.205.314,0	9	10	0	0,0	0,0	0,0
01.EBB.951.722	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1,0	Unit	1.205.314,0	1.205.314,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		Orang/ Layanan/ Rekomendasi		3.682.608,0				0,0	0,0	0,0
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	564	Orang		1.155.699,0	583	583	583	0,0	0,0	0,0
01.EBC.954.723	Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur	564,0	Orang	2.049,1	1.155.699,0	650,0	650,0	650,0	0,0	0,0	0,0
01.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	280	Orang		2.526.909,0	583	583	583	0,0	0,0	0,0
01.EBC.996.701	Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional	583,0	Orang	2.930,3	1.708.362,0	583,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBC.996.702	Pengembangan Kompetensi SDM	0,0	Orang	Infinity	818.547,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Dokumen/ Layanan/ Laporan/ Rekomendasi		3.183.109,0				0,0	0,0	0,0
01.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6	Dokumen		1.281.945,0	6	6	6	0,0	0,0	0,0
01.EBD.952.721	Penyusunan Perencanaan	4,0	Dokumen	126.311,8	505.247,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.952.722	Penyusunan Anggaran	2,0	Dokumen	388.349,0	776.698,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3	Dokumen		597.937,0	4	4	4	0,0	0,0	0,0
01.EBD.953.721	Pelaksanaan Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4,0	Dokumen	149.484,3	597.937,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	2	Dokumen		742.474,0	5	5	5	0,0	0,0	0,0
01.EBD.955.721	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan	1,0	Dokumen	418.882,0	418.882,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.955.722	Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut LHP dan Dokumen TPTGR	1,0	Dokumen	58.933,0	58.933,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.955.723	Monitoring dan Evaluasi Keuangan	1,0	Dokumen	25.872,0	25.872,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.EBD.955.724	Pengelolaan Perbendaharaan	1,0	Dokumen	238.787,0	238.787,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	3	Dokumen		460.231,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBD.961.721	Pengelolaan RB dan WBK/WBBM	1,0	Dokumen	314.221,0	314.221,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.961.722	Penyelenggaraan SPIP	0,0	Dokumen	Infinity	146.010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Dokumen		100.522,0	5	5	5	0,0	0,0	0,0
01.EBD.974.721	Penatausahaan Kearsipan	1,0	Dokumen	100.522,0	100.522,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Total					73.123.731,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 024.11.1.416151/2025**



DS:4346-1409-0260-1982

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 11

Tanggal : 13 Oktober 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(024)	KEMENTERIAN KESEHATAN
2. Unit Organisasi	:	(11)	BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
3. Provinsi	:	(01)	DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker	:	(416151)	KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Sebesar	:	Rp. 339.979.964.000	(TIGA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

07 KESEHATAN

07.90 KESEHATAN LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	339.979.964.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA VII (182) Rp. 339.979.964.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024

A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.

LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025



DS:4346-1409-0260-1982

Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

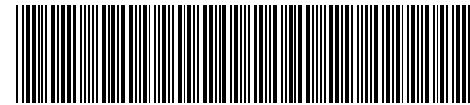
DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Rp.	11.479.560.000
DG.6804	Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Rp.	11.479.560.000
DS	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Rp.	255.376.673.000
DS.6833	Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan	Rp.	86.698.544.000
DS.6834	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	Rp.	12.738.787.000
DS.6835	Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	Rp.	15.523.394.000
DS.6836	Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	Rp.	134.533.760.000
DS.6837	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	Rp.	5.882.188.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	73.123.731.000
WA.6797	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Rp.	73.123.731.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025

I A. INFORMASI KINERJA



DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I A. 1

Program	:	024.11.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN			11.479.560.000
Kegiatan	:	6804	Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan			11.479.560.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	6804.AEA	Koordinasi	4,00	kegiatan	3.328.056.000
Rincian Output	:	01	AEA.001 Audit Koding di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (PK-33)	1.00	kegiatan	1.044.220.000
	:	02	AEA.002 Fasilitasi Penyusunan Regulasi dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (PK-20)	1.00	kegiatan	437.450.000
	:	03	AEA.003 Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Pengalokasian dan Implementasi Pembiayaan Kesehatan (PK-20)	1.00	kegiatan	1.296.546.000
	:	04	AEA.004 Fasilitasi Dewan Pertimbangan Klinis	1.00	kegiatan	549.840.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	6804.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	3.000,00	orang	1.777.514.000
Rincian Output	:	01	AEF.001 Orang yang Mendapatkan Advokasi Pembiayaan Kesehatan untuk Kegiatan Promotif dan Preventif	3000,00	orang	1.777.514.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	6804.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	300,00	Orang, Kegiatan	4.205.010.000
Rincian Output	:	01	DCM.001 Tenaga Koder FKRTL yang Mengikuti Pelatihan Koding dalam Program JKN	300,00	Orang	4.205.010.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	6804.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Rekomendasi	240.000.000
Rincian Output	:	01	FAE.001 Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	1,00	Laporan	240.000.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	6804.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	6,00	Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	1.928.980.000
Rincian Output	:	01	FBA.001 Penguan Pelaksanaan Health Account (PHA/DHA) di Daerah (PK-17)	6,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.928.980.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025

I A. INFORMASI KINERJA



DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I A. 2

Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah

Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi,
Kab/Kota

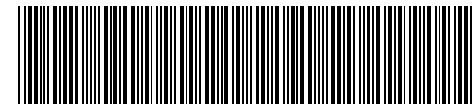
Program	:	024.11.DS	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan			255.376.673.000
Kegiatan	:	6833	Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan			86.698.544.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output	1	6833.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	31,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	8.519.233.000
Rincian Output	:	01 ABG.011	Kajian Pengembangan Kebijakan Baru Bidang Upaya Kesehatan (LP-1)	5.00	Rekomendasi Kebijakan	933.350.000
		02 ABG.012	Kajian Evaluasi Kebijakan Tata Kelola dan Penguatan Mutu Layanan Kesehatan Primer (LP-1)	4.00	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000.000
		03 ABG.013	Kajian Evaluasi Kebijakan Tata Kelola dan Penguatan Mutu Layanan Kesehatan Rujukan (LR-11)	4.00	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000.000
		04 ABG.014	Kajian Evaluasi Kebijakan Program Kesehatan Masyarakat (LP-3)	4.00	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000.000
		05 ABG.015	Kajian Evaluasi Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (LP-9)	4.00	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000.000
		06 ABG.016	Kajian Evaluasi Kebijakan Promosi Kesehatan, Deteksi Dini dan Pengendalian PTM (LP-10)	4.00	Rekomendasi Kebijakan	990.208.000
		07 ABG.017	Evaluasi Kebijakan dan Strategi Upaya Kesehatan Masyarakat (LP-1)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	188.830.000
		08 ABG.018	Evaluasi Kebijakan dan Strategi Upaya Kesehatan Perseorangan (LP-1)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	100.000.000
		09 ABG.019	Evaluasi Kebijakan dan Strategi Tata Kelola Mutu Fasyankes Primer (LR-11)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	100.000.000
		10 ABG.020	Evaluasi Kebijakan dan Strategi Layanan Kesehatan Lanjutan dan Klinis (LP-1)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	171.624.000
		11 ABG.021	Evaluasi Kebijakan dan Strategi Tata Kelola dan Mutu Fasyankes Lanjutan (LR-11)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	175.000.000
		12 ABG.022	Rekomendasi Kebijakan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Pemeriksaan Kesehatan Gratis (LP-1)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.460.221.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025

I A. INFORMASI KINERJA



DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I A. 3

Kebijakan Bidang Kesehatan				Rekomendasi Kebijakan, Kajian			
Klasifikasi Rincian Output 2	:	6833.AEA	Koordinasi	8,00	kegiatan	2.899.311.000	
Rincian Output	:	01	AEA.003	Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan di Bidang Upaya Kesehatan	1.00	kegiatan	1.000.778.000
		02	AEA.004	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bidang Upaya Kesehatan	1.00	kegiatan	1.098.523.000
		03	AEA.005	Quality Control Rancangan Regulasi Bidang Upaya Kesehatan	6.00	kegiatan	800.010.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	6833.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	75.280.000.000	
Rincian Output	:	01	PBG.004	Survei Konsumsi Makanan Individu (LP-4)	1.00	Kajian	75.280.000.000
Kegiatan	:	6834	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan			12.738.787.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 4	:	6834.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	25,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	10.978.094.000	
Rincian Output	:	01	ABG.041	Kajian Pengembangan Kebijakan Baru Bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (RF-13)	4.00	Rekomendasi Kebijakan	3.566.184.000
		02	ABG.042	Kajian Evaluasi Kebijakan Sistem Ketahanan Alat Kesehatan (RF-15)	3.00	Rekomendasi Kebijakan	1.173.826.000
		03	ABG.043	Kajian Evaluasi Kebijakan Sistem Ketahanan Farmasi (RF-13)	3.00	Rekomendasi Kebijakan	1.181.054.000
		04	ABG.045	Kajian Evaluasi Kebijakan Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan (SDM-21)	3.00	Rekomendasi Kebijakan	1.111.854.000
		05	ABG.046	Kajian Evaluasi Kebijakan Penyediaan, Peningkatan Mutu, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan (SDM-23)	3.00	Rekomendasi Kebijakan	1.111.854.000
		06	ABG.047	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kebijakan Baru Bidang Sistem Ketahanan Kesehatan (HS-29)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	19.000.000
		07	ABG.048	Rekomendasi Kebijakan Strategi Penanggulangan Kedaruratan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	72.860.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025

I A. INFORMASI KINERJA



DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I A. 4

Kebijakan Bidang Kesehatan				Rekomendasi Kebijakan, Kajian		
		Kesehatan & Perubahan Iklim (HS 32)		1.00	Rekomendasi Kebijakan	
08	ABG.049	Evaluasi Kebijakan Strategi Penanggulangan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (HS 35)		1.00	Rekomendasi Kebijakan	893.330.000
09	ABG.050	Evaluasi Kebijakan Strategi Imunisasi, Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan (HS 29)		1.00	Rekomendasi Kebijakan	147.011.000
10	ABG.051	Evaluasi Kebijakan Sistem Ketahanan dan Strategi Tata Kelola Keracunan (HS-29)		1.00	Rekomendasi Kebijakan	235.621.000
11	ABG.052	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kebijakan Baru Bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan (SDM-21)		1.00	Rekomendasi Kebijakan	230.000.000
12	ABG.053	Rekomendasi Kebijakan dan Strategi SDM Kesehatan (SDM-21)		1.00	Rekomendasi Kebijakan	344.000.000
13	ABG.054	Rekomendasi Kebijakan dan Strategi Sistem Informasi Kesehatan (TK-31)		1.00	Rekomendasi Kebijakan	640.000.000
14	ABG.055	Rekomendasi Kebijakan dan Strategi Integrasi Sumber Daya Kesehatan (SDM-21)		1.00	Rekomendasi Kebijakan	251.500.000
Klasifikasi Rincian Output 5 :	6834.AEA	Koordinasi		9,00	kegiatan	1.760.693.000
Rincian Output :	01	AEA.004	Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	1.00	kegiatan	550.230.000
	02	AEA.005	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	1.00	kegiatan	485.812.000
	03	AEA.006	Quality Control Rancangan Regulasi bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	3.00	kegiatan	316.845.000
	04	AEA.007	Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan bidang Sistem Ketahanan Kesehatan	1.00	kegiatan	131.691.000
	05	AEA.008	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan bidang Sistem Ketahanan Kesehatan	1.00	kegiatan	97.828.000
	06	AEA.010	Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan Bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan	1.00	kegiatan	86.987.000
	07	AEA.011	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan	1.00	kegiatan	91.300.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025

I A. INFORMASI KINERJA



DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I A. 5

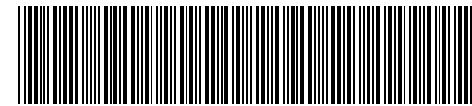
Kegiatan	:	6835	Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan				15.523.394.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output	6	6835.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	17,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian		13.214.183.000
Rincian Output	:	01 ABG.011	Kajian Pengembangan Kebijakan Baru Bidang Pembiayaan Jaminan Kesehatan dan Desentralisasi Kesehatan (PK-20)	1.00	Rekomendasi Kebijakan		509.880.000
	02 ABG.012	Rekomendasi Kebijakan Penataan Ulang Manfaat dalam Program JKN (PK-18)	1.00	Rekomendasi Kebijakan		800.150.000	
	03 ABG.013	Rekomendasi Kebijakan Sinergi Pembiayaan Pusat dan Daerah (PK-20)	2.00	Rekomendasi Kebijakan		1.354.880.000	
	04 ABG.014	Rekomendasi Kebijakan Health Technology Assesment (PK-19)	6.00	Rekomendasi Kebijakan		4.623.658.000	
	05 ABG.015	Rekomendasi Kebijakan INA Grouper dalam Program JKN (PK-18)	1.00	Rekomendasi Kebijakan		1.093.850.000	
	06 ABG.016	Rekomendasi Kebijakan Annual Review dan Evaluasi Tarif INA CBG dalam Program JKN (PK-18)	1.00	Rekomendasi Kebijakan		1.222.252.000	
	07 ABG.017	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Metode Pembayaran di Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama (PK-18)	1.00	Rekomendasi Kebijakan		1.160.700.000	
	08 ABG.018	Rekomendasi Kebijakan National Health Account (PK-17)	1.00	Rekomendasi Kebijakan		2.128.813.000	
	09 ABG.019	Rekomendasi Kebijakan Kenaikan Investasi Kesehatan di bidang Farmasi (PK-20)	1.00	Rekomendasi Kebijakan		107.140.000	
	10 ABG.020	Rekomendasi Kebijakan Kenaikan Investasi Kesehatan di bidang Alkes (PK-20)	1.00	Rekomendasi Kebijakan		152.860.000	
	11 ABG.021	Rekomendasi Kebijakan Kenaikan Investasi Kesehatan di bidang Fasyankes (PK-20)	1.00	Rekomendasi Kebijakan		60.000.000	
Klasifikasi Rincian Output	7	6835.AEA	Koordinasi	6,00	kegiatan		2.309.211.000
Rincian Output	:	01 AEA.001	Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan Bidang Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	1.00	kegiatan		491.475.000
	02 AEA.002	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bidang Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	1.00	kegiatan		837.800.000	
	03 AEA.003	Quality Control Rancangan Regulasi Bidang Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	3.00	kegiatan		546.360.000	
	04 AEA.005	Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Pengalokasian dan Implementasi	1.00	kegiatan		433.576.000	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025

I A. INFORMASI KINERJA



DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I A. 6

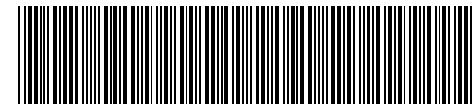
Koordinasi				kegiatan	
Pembiayaan Kesehatan				1.00	kegiatan
Kegiatan	:	6836	Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan		134.533.760.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:				
Klasifikasi Rincian Output 8	:	6836.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	18,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian
Rincian Output	:	01 ABG.031	Kajian pengembangan kebijakan baru bidang Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan (TK-31)	2,00	Rekomendasi Kebijakan
		02 ABG.032	Kajian Evaluasi Kebijakan Kesehatan Bilateral (LR-11)	2,00	Rekomendasi Kebijakan
		03 ABG.033	Kajian Evaluasi Kebijakan Kesehatan Regional (HS-32)	2,00	Rekomendasi Kebijakan
		04 ABG.034	Kajian Evaluasi Kebijakan Kesehatan Multilateral (HS-32)	2,00	Rekomendasi Kebijakan
		05 ABG.035	Kajian Evaluasi Kebijakan Hibah dan Pinjaman (RF-14)	2,00	Rekomendasi Kebijakan
		06 ABG.036	Kajian Evaluasi Kebijakan Bioteknologi (TK-25)	2,00	Rekomendasi Kebijakan
		07 ABG.037	Kajian Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Kesehatan (TK-31)	2,00	Rekomendasi Kebijakan
		08 ABG.038	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kebijakan baru bidang Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global (HS-32)	1,00	Rekomendasi Kebijakan
		09 ABG.039	Evaluasi Kebijakan Mitra Pembangunan (RF-14)	1,00	Rekomendasi Kebijakan
		10 ABG.040	Evaluasi Kebijakan Desentralisasi Kesehatan (PK-20)	1,00	Rekomendasi Kebijakan
		11 ABG.041	Evaluasi Kebijakan Transformasi Kesehatan (HS-29)	1,00	Rekomendasi Kebijakan
Klasifikasi Rincian Output 9	:	6836.AEA	Koordinasi	6,00	kegiatan
Rincian Output	:	01 AEA.003	Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan bidang Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	1,00	kegiatan
		02 AEA.004	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan bidang Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	1,00	kegiatan
		03 AEA.005	Quality Control Rancangan Regulasi bidang Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	2,00	kegiatan

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025

I A. INFORMASI KINERJA



DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I A. 7

Koordinasi

kegiatan

04	AEA.006	Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan bidang Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global	1.00	kegiatan	192.742.000
05	AEA.007	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan bidang Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global	1.00	kegiatan	143.376.000

Klasifikasi Rincian Output	10	6836.AEC	Kerja sama	56,00	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	114.910.623.000
----------------------------	----	----------	------------	-------	--------------------------------	-----------------

Rincian Output	: 01	AEC.003	Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Multilateral Bidang Kesehatan (HS 32)	3.00	Kesepakatan	887.362.000
	: 02	AEC.005	Dokumen Pinjaman Hibah Luar Negeri (HS 32)	3.00	Kesepakatan	598.081.000
	: 03	AEC.006	Dokumen Kerja Sama Bioteknologi dan Informatika Kesehatan (TK 25)	2.00	Kesepakatan	1.957.981.000
	: 04	AEC.011	Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Regional Bidang Kesehatan (RF 14)	14.00	Kesepakatan	3.058.641.000
	: 05	AEC.012	Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Bilateral Bidang Kesehatan (RF 14)	15.00	Kesepakatan	928.432.000
	: 06	AEC.013	Kontribusi Indonesia Pada Organisasi Internasional Non Pemerintah (HS 32)	2.00	Dokumen	98.743.000.000
	: 07	AEC.014	Operasionalisasi ACPHEED (HS 29)	1.00	Dokumen	8.056.466.000
	: 08	AEC.015	Dokumen Mitra Pembangunan Kesehatan (HS-32)	16.00	Kesepakatan	680.660.000

Klasifikasi Rincian Output	11	6836.AEG	Konferensi dan Event	22,00	Kegiatan, Paket Kegiatan	12.737.822.000
----------------------------	----	----------	----------------------	-------	--------------------------	----------------

Rincian Output	: 01	AEG.001	Tuan Rumah Penyelenggaraan Pertemuan Internasional (HS 32)	2.00	Kegiatan	6.213.791.000
	: 02	AEG.003	Partisipasi aktif dalam Sidang Internasional Bilateral, Regional dan Multilateral Bidang Kesehatan (HS 32)	20.00	Kegiatan	6.524.031.000

Kegiatan	: 6837	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan				5.882.188.000
----------	--------	--	--	--	--	---------------

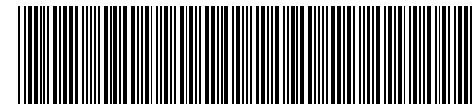
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
----------------------------	---	--	--	--	--	--

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025

I A. INFORMASI KINERJA



DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I A. 8

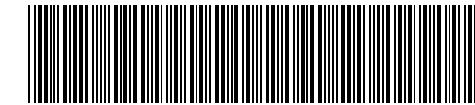
Klasifikasi Rincian Output	12	: 6837.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	2,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	3.247.286.000	
Rincian Output		: 01	ABG.001	Analisis Situasi Kesehatan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	3.247.286.000
Klasifikasi Rincian Output	13	: 6837.AEA	Koordinasi	2,00	kegiatan	2.634.902.000	
Rincian Output		: 01	AEA.001	Advokasi dan Komunikasi Kebijakan Kesehatan	1,00	kegiatan	1.382.302.000
		: 02	AEA.002	Integrasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan	1,00	kegiatan	1.252.600.000
Program		: 024.11.WA	Program Dukungan Manajemen			73.123.731.000	
Kegiatan		: 6797	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan			73.123.731.000	
Indikator Kinerja Kegiatan		:					
Klasifikasi Rincian Output	1	: 6797.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,00	Unit	615.830.000	
Rincian Output		: 01	CAN.951	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,00	Unit	615.830.000
Klasifikasi Rincian Output	2	: 6797.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,00	Unit	1.266.072.000	
Rincian Output		: 01	CCL.951	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,00	Unit	1.266.072.000
Klasifikasi Rincian Output	3	: 6797.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	19,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	63.104.660.000	
Rincian Output		: 01	EBA.956	Layanan BMN	1,00	Layanan	373.818.000
		: 02	EBA.957	Layanan Hukum	1,00	Layanan	608.050.000
		: 03	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3,00	Layanan	909.276.000
		: 04	EBA.959	Layanan Protokoler	1,00	Layanan	379.829.000
		: 05	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	327.052.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025

I A. INFORMASI KINERJA



DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I A. 9

Layanan Dukungan Manajemen Internal

				Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	
06	EBA.962	Layanan Umum	5.00	Layanan	5.766.160.000
07	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.00	Layanan	161.002.000
08	EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	5.00	Layanan	136.495.000
09	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	54.442.978.000
Klasifikasi Rincian Output 4 :	6797.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	12,00	Unit, m2, Paket	1.288.314.000
Rincian Output :	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	12.00	Unit	1.288.314.000
Klasifikasi Rincian Output 5 :	6797.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	844,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	3.682.608.000
Rincian Output :	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	564.00	Orang	1.155.699.000
	02	EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	280.00	Orang	2.526.909.000
Klasifikasi Rincian Output 6 :	6797.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	15,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	3.166.247.000
Rincian Output :	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6.00	Dokumen	1.273.945.000
	02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.00	Dokumen	597.937.000
	03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	2.00	Dokumen	742.474.000
	04	EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	3.00	Dokumen	451.369.000
	05	EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.00	Dokumen	100.522.000

Jakarta, 02 Desember 2024
 a.n. MENTERI KESEHATAN
 SEKRETARIS JENDERAL

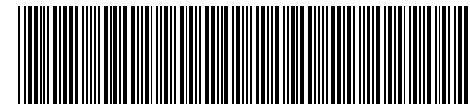
ttd.

Kunta Wibawa Dasa Nugraha
 NIP. 196811301994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025



DS:4346-1409-0260-1982

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I B. 1

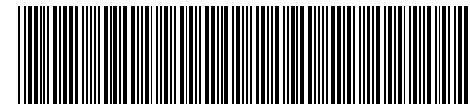
				Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	339.979.964.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp.		0
1. Rupiah Murni	Rp.	339.979.964.000		(2) RPLN US\$ 0 Rp.		0
2. PNBP	Rp.		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp.			0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	(2) RHLN US\$ 0 Rp.			0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0			0
5. Hibah Langsung	Rp.	0	d. Hibah Dalam Negeri IDR 0			0
6. SBSN PBS	Rp.	0	e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0			0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :			f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0			(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUNINI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	1. Pinjaman Luar Negeri	2. Hibah Luar Negeri	3) Mata Uang NPP/H	4) Ekuivalen USD	5) Ekuivalen Rupiah	1) PP	2) PL	3) RK	4) LC
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025



DS:4346-1409-0260-1982

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : II. 1

Kewenangan : (KP)

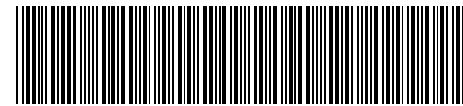
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
416151	KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN	-	339.043.910	936.054	-	-	339.979.964		
024.11.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	-	11.479.560	-	-	-	11.479.560		
6804	Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	-	11.479.560	-	-	-	11.479.560		
6804.AEA	Koordinasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.328.056	-	-	-	3.328.056	01 . 51	
01	RM	-	3.328.056	-	-	-	3.328.056	182@	
6804.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.777.514	-	-	-	1.777.514	01 . 51	
01	RM	-	1.777.514	-	-	-	1.777.514	182@	
6804.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.205.010	-	-	-	4.205.010	01 . 51	
01	RM	-	4.205.010	-	-	-	4.205.010	182@	
6804.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	240.000	-	-	-	240.000	01 . 51	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025



DS:4346-1409-0260-1982

II. RINCIAN PENGELOUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : II. 2

Kewenangan : (KP)

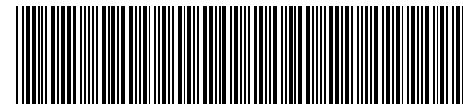
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM		-	240.000	-	-	-	240.000	182@
6804.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		-	1.928.980	-	-	-	1.928.980	01 . 51
01	RM		-	1.928.980	-	-	-	1.928.980	182@
024.11.DS	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan		-	254.998.673	378.000	-	-	255.376.673	
6833	Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan		-	86.320.544	378.000	-	-	86.698.544	
6833.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		-	8.519.233	-	-	-	8.519.233	01 . 51
01	RM		-	8.519.233	-	-	-	8.519.233	182@
6833.AEA	Koordinasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		-	2.899.311	-	-	-	2.899.311	01 . 51
01	RM		-	2.899.311	-	-	-	2.899.311	182@
6833.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		-	74.902.000	378.000	-	-	75.280.000	01 . 51

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025



DS:4346-1409-0260-1982

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : II. 3

Kewenangan : (KP)

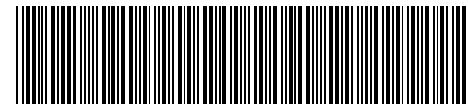
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	74.902.000	378.000	-	-	75.280.000	182@	
6834	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	-	12.738.787	-	-	-	12.738.787		
6834.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	10.978.094	-	-	-	10.978.094	01 . 51	
01	RM	-	10.978.094	-	-	-	10.978.094		
6834.AEA	Koordinasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.760.693	-	-	-	1.760.693	01 . 51	
01	RM	-	1.760.693	-	-	-	1.760.693		
6835	Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	-	15.523.394	-	-	-	15.523.394	182@	
6835.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	13.214.183	-	-	-	13.214.183		
01	RM	-	13.214.183	-	-	-	13.214.183	182@	
6835.AEA	Koordinasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.309.211	-	-	-	2.309.211		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025



DS:4346-1409-0260-1982

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : II. 4

Kewenangan : (KP)

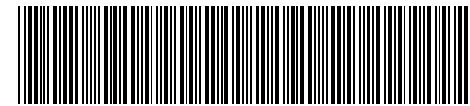
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	2.309.211	-	-	-	2.309.211	182@	
6836	Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	-	134.533.760	-	-	-	134.533.760		
6836.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.881.150	-	-	-	4.881.150	01 . 51	
01	RM	-	4.881.150	-	-	-	4.881.150	182@	
6836.AEA	Koordinasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.004.165	-	-	-	2.004.165	01 . 51	
01	RM	-	2.004.165	-	-	-	2.004.165	182@	
6836.AEC	Kerja sama (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	114.910.623	-	-	-	114.910.623	01 . 51	
01	RM	-	114.910.623	-	-	-	114.910.623	182@	
6836.AEG	Konferensi dan Event (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	12.737.822	-	-	-	12.737.822	01 . 51	
01	RM	-	12.737.822	-	-	-	12.737.822	182@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025



DS:4346-1409-0260-1982

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : II. 5

Kewenangan : (KP)

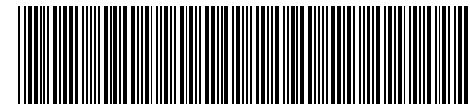
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6837	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	-	5.882.188		-	-	-	5.882.188	
6837.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		3.247.286		-	-	3.247.286	01 . 51	
01	RM	-	3.247.286		-	-	3.247.286	182@	
6837.AEA	Koordinasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		2.634.902		-	-	2.634.902	01 . 51	
01	RM	-	2.634.902		-	-	2.634.902	182@	
024.11.WA	Program Dukungan Manajemen		72.565.677	558.054		-	73.123.731		
6797	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	-	72.565.677	558.054		-	73.123.731		
6797.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		597.010	18.820	-	-	615.830	01 . 51	
01	RM	-	597.010	18.820		-	615.830	182@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025



DS:4346-1409-0260-1982

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : II. 6

Kewenangan : (KP)

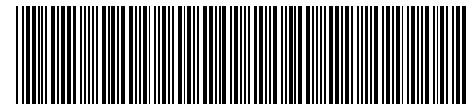
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6797.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.266.072	-	-	-	1.266.072	01 . 51	
01	RM	-	1.266.072	-	-	-	1.266.072	182@	
6797.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	63.052.160	52.500	-	-	63.104.660	01 . 51	
01	RM	-	63.052.160	52.500	-	-	63.104.660	182@	
6797.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	801.580	486.734	-	-	1.288.314	01 . 51	
01	RM	-	801.580	486.734	-	-	1.288.314	182@	
6797.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.682.608	-	-	-	3.682.608	01 . 51	
01	RM	-	3.682.608	-	-	-	3.682.608	182@	
6797.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.166.247	-	-	-	3.166.247	01 . 51	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025



DS:4346-1409-0260-1982

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : II. 7

Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	3.166.247	-	-	-	3.166.247	182@	
	JUMLAH	-	339.043.910	936.054	-	-	339.979.964		

Jakarta, 02 Desember 2024

a.n. MENTERI KESEHATAN

SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

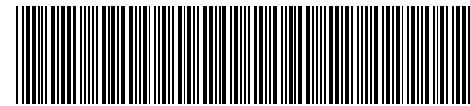
Kunta Wibawa Dasa Nugraha

NIP. 196811301994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025



DS:4346-1409-0260-1982

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

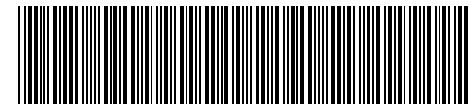
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	416151	KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.144.121	2.900.650	20.897.709	4.043.662	3.960.314	3.521.699	5.023.297	6.299.625	88.272.302	9.779.501	11.448.259	182.688.822	339.979.964
		BELANJA BARANG	1.144.121	2.900.650	20.897.709	3.923.803	3.958.113	3.502.433	5.022.905	6.286.292	88.218.176	9.776.958	11.444.714	181.968.034	339.043.910
024.11.DG.6804		BELANJA MODAL	0	0	0	119.859	2.201	19.266	392	13.333	54.126	2.543	3.545	720.788	936.054
		Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.479.560	11.479.560
024.11.DS.6833		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.479.560	11.479.560
		Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan	82.475	98.206	180.438	185.589	185.589	210.020	528.286	770.004	862.027	748.550	808.183	82.039.178	86.698.544
024.11.DS.6834		52 BELANJA BARANG DAN JASA	82.475	98.206	180.438	185.589	185.589	210.020	528.286	770.004	862.027	748.550	808.183	81.661.178	86.320.544
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378.000	378.000
024.11.DS.6835		Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	25.712	30.665	49.642	91.693	95.731	71.431	452.447	559.791	506.851	1.056.505	385.677	9.412.641	12.738.787
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	25.712	30.665	49.642	91.693	95.731	71.431	452.447	559.791	506.851	1.056.505	385.677	9.412.641	12.738.787
024.11.DS.6836		Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	237.286	270.810	237.286	69.813	69.813	69.813	131.421	111.607	531.096	744.863	1.040.702	12.008.884	15.523.394
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	237.286	270.810	237.286	69.813	69.813	69.813	131.421	111.607	531.096	744.863	1.040.702	12.008.884	15.523.394
024.11.DS.6837		Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	0	47.776	16.589.007	3.450	130.976	217.027	457.004	2.161.571	82.837.452	1.551.983	3.542.719	26.994.795	134.533.760
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	47.776	16.589.007	3.450	130.976	217.027	457.004	2.161.571	82.837.452	1.551.983	3.542.719	26.994.795	134.533.760
		Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	0	0	16.997	0	0	8.282	38.559	125.749	12.043	111.591	127.286	5.441.681	5.882.188

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025



DS:4346-1409-0260-1982

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
024.11.WA.6797	52 BELANJA BARANG DAN JASA	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	0	0	16.997	0	0	8.282	38.559	125.749	12.043	111.591	127.286	5.441.681	5.882.188
	52 BELANJA BARANG DAN JASA		798.648	2.453.193	3.824.340	3.693.117	3.478.205	2.945.126	3.415.580	2.570.904	3.522.833	5.566.009	5.543.692	35.312.083	73.123.731
	53 BELANJA MODAL		798.648	2.453.193	3.824.340	3.573.258	3.476.004	2.925.860	3.415.188	2.557.570	3.468.707	5.563.466	5.540.147	34.969.295	72.565.677

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP. 196811301994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
IV A. B L O K I R



DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : [11] BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 Provinsi : [01] DKI JAKARTA
 Kode dan Nama Satker : [416151] KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : IV.A. 1
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
416151	KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 172.635.987 52 Belanja Barang Rp. 172.089.470 53 Belanja Modal Rp. 546.517		Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025 Rp. 947.520
024.11.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
6804	Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
6804.AEA	Koordinasi 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 110.970 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 55.000 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 118.100 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.411.456 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 107.160 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	6804.AEF	Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025 Rp. 577.850
		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		521211	Belanja Bahan(RM)
		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 547.884
		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025	
		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		522141	Belanja Sewa(RM)
		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 75.000
		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025	
		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		522151	Belanja Jasa Profesi(RM)
		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 56.900
		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025	
		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 953.730
		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025	
		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 144.000
		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025	
		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
IV A. B L O K I R



DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : [11] BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 Provinsi : [01] DKI JAKARTA
 Kode dan Nama Satker : [416151] KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : IV.A. 2
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6804.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 129.000 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522141 Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.600 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 179.400 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 228.600 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 240.000 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.406.410 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 240.000 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6804.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.580 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 47.000 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 234.750 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.400 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.629.250 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan Kebijakan Bidang Kesehatan 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 300.613 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
6804.FAE		024.11.DS	
		6833	
		6833.ABG	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
IV A. B L O K I R



DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : [11] BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 Provinsi : [01] DKI JAKARTA
 Kode dan Nama Satker : [416151] KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : IV.A. 3
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN	
	522131 Belanja Jasa Konsultan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 463.950	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 152.648
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 505.600	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 98.226
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 1.991.320	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 21.060
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 805.435	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 504.000
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 19.040	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 378.316
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 2.178.000	6833.PBG Kebijakan Bidang Kesehatan 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 154.027
6833.AEA	Koordinasi 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 162.000	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 67.768.773

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025

IV A. B L O K I R



DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : [11] BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [416151] KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : IV.A. 4

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN	
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	2.331.000	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025	200.000
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	79.800	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025	3.733.352
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	864.000	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025	253.120
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	3.704.400	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025	2.494.080
	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	378.000	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025	682.048
6834	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan			
6834.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	6834.AEA	Koordinasi	
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	76.600	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025	26.850
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025	574.400	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025	122.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
IV A. B L O K I R



DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : [11] BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 Provinsi : [01] DKI JAKARTA
 Kode dan Nama Satker : [416151] KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : IV.A. 5
 (dalam ribuan rupiah)

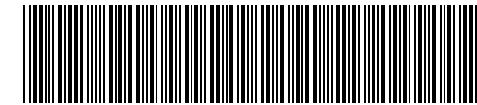
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 519.735 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.000.000 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.200 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.143.494 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 248.382 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 35.700 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 304.233 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.109.720 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 6835 Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.351.925 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025
6835.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 257.835 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 685.000 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.771.800	6835.AEA Koordinasi 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 75.735 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 95.200

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025

IV A. B L O K I R



DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : [11] BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [416151] KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : IV.A. 6

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 477.660 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 266.400 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 960.640 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan		Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.376.000 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.720 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.000 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 99.600 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 818.800 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 665.718 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
6836		6836.AEA	Koordinasi
6836.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 135.270 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 453.600 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.229.189 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
IV A. B L O K I R



DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : [11] BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 Provinsi : [01] DKI JAKARTA
 Kode dan Nama Satker : [416151] KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : IV.A. 7
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6836.AEC	Kerja sama 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 95.154 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 83.300 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.234.297 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 250.678 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.186.000 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.203.750 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Konferensi dan Event 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 98.460 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 68.300 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522141 Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 726.701 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 51.300 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.626.309 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 59.572 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 134.440 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.454.930 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
IV A. B L O K I R



DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : [11] BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 Provinsi : [01] DKI JAKARTA
 Kode dan Nama Satker : [416151] KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : IV.A. 8
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 321.000 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 377.428 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.176.114 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.683.182 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Koordinasi
6837		6837.AEA	
6837.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 28.604 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025		521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 162.399 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 272.000 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.235 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 100.000 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522131 Belanja Jasa Konsultan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 120.000 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 358.828 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 63.600 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.040		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 395.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025

IV A. B L O K I R



DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : [11] BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [416151] KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : IV.A. 9

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 425.608 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 43.110 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 362.880 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 928.324 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	6797.CCL	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 104.386 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 30.060 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 20.600 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 445.200 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 148.386 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 523199 Belanja Pemeliharaan Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 79.380 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.914 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
024.11.WA 6797 6797.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 122.754 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522141 Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 280.680 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
IV A. B L O K I R



DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : [11] BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 Provinsi : [01] DKI JAKARTA
 Kode dan Nama Satker : [416151] KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : IV.A. 10
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6797.EBA	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.610 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 130.900 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 72.000 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.956.474 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.004 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.615.779 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Layanan Dukungan Manajemen Internal		522111 Belanja Langganan Listrik(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 496.992 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 137.256 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522141 Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 666.820 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 57.539 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 127.400 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 20.799 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.972.455 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 804.307 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
IV A. B L O K I R



DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : [11] BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 Provinsi : [01] DKI JAKARTA
 Kode dan Nama Satker : [416151] KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : IV.A. 11
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Bangunan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6797.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal 522141 Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	523121	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025	1.966.816	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM) Tidak Dapat Dicairkan Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524111	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025	2.143.961	6797.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524113	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025
	Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025	212.548	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524114	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025	542.940	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524119	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025
	Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025	288.184	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524219	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM) Tidak Dapat Dicairkan Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun2025	1.617.576	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		195.270

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
IV A. B L O K I R



DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : [11] BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 Provinsi : [01] DKI JAKARTA
 Kode dan Nama Satker : [416151] KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : IV.A. 12
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6797.EBD	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 378.200 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 817.423 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 902.358 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 139.864 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 151.200 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 711.177 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Layanan Manajemen Kinerja Internal 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 299.754 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 534.966 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 215.600 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 80.000 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 105.200 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025		

Jakarta, 02 Desember 2024
 a.n. MENTERI KESEHATAN
 SEKRETARIS JENDERAL

tt.

Kunta Wibawa Dasa Nugraha
 NIP. 196811301994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
IV B. C A T A T A N



DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : [11] BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [416151] KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP. 196811301994031001

DAFTAR KONTRIBUTOR

Tim Pengarah:

1. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
2. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Tim Penyusun:

1. Tri Ramadhany
2. Titin Delia
3. Sari Ramadhani
4. Fairuz Wardaty
5. Martin Lasty Marbun
6. Nadya Miftahuljanna



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
TAHUN 2025